BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah telah diberikan hak, kewenangan, serta kewajiban oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan fungsinya di bidang pelayanan publik. Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tujuan utama diterapkannya otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mengakomodasi keberagaman potensi serta karakteristik masing-masing daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pembangunan daerah memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sesuai kebutuhan masing-masing daerah (Lestari *et al.*, 2018).

Ironinya, alokasi dana APBN sering kali tidak mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Soares *et al.* (2019) menemukan bukti empiris bahwa kondisi tersebut dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara proposal terkait anggaran dan alokasi dana yang diajukan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tentunya memerlukan sumber pendapatan alternatif yang dapat diandalkan, yakni melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber penerimaan PAD dalam hal ini terdiri atas beberapa komponen yang mencakup: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Pendapatan Lainnya yang Sah.

Tabel 1.1
Struktur Realisasi Penerimaan PAD di Indonesia Tahun 2019-2023

No	Jenis Penerimaan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Daerah	208.938,20	179.170,49	199.306,00	238.794,97	253.360,92
2	Retribusi Daerah	9.790,45	8.410,25	8.481,22	8.529,36	9.252,32
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.876,87	8.565,19	9.480,63	10.917,87	13.225,04
4	Lain-Lain PAD yang Sah	66.054,04	67.920,04	79.741,94	70.190,06	69.411,43
TOTAL		293.659,55	264.065,97	297.009,78	328.431,97	345.249,71

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Data terkait realisasi sumber penerimaan PAD dalam tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa sumber pendapatan daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir berada di sektor pajak daerah. Meskipun realisasi penerimaan pajak daerah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, tetapi angka tersebut cenderung mengalami peningkatan kembali dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dengan demikian, fungsi pajak daerah dalam realisasi PAD secara eksplisit menunjukkan peran penting dalam menopang pendanaan untuk pembangunan daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tak terkecuali provinsi Bali (Kementerian Keuangan, 2024).

Sihombing & Alestiana (2020) menjelaskan bahwa pajak daerah dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan kepada kas daerah. Pajak daerah memiliki sifat yang memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan ditujukan untuk membiayai rumah tangga daerah serta mendukung kemakmuran rakyat tanpa imbalan secara langsung. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi dua kategori yang meliputi pajak

daerah tingkat I (dikelola provinsi) dan pajak daerah tingkat II (dikelola kabupaten/kota). Pajak daerah tingkat I dapat mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sedangkan, komponen yang termasuk dalam pajak daerah tingkat II seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, hingga Pajak Hiburan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 menerangkan bahwa diantara berbagai jenis pajak tersebut, PKB telah memberikan sumbang asih sebesar 43,77% dari total penerimaan PAD, yang mana menjadikannya sebagai kontributor terbesar dalam struktur penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan sumber penerimaan pajak daerah lainnya. Pratiwi & Yuniarta (2022) juga menerangkan hal yang serupa, yakni PKB merupakan jenis pajak daerah yang memegang peringkat pertama dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan PAD. Tabel 1.2 di bawah ini memberi indikasi bahwa sejak tahun 2019 hingga 2023, PKB tetap menjadi pilar utama dalam sumber penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Setiap Tahun (Rupiah)				
	PKB	BBNKB	PBBKB	Pajak Air Permukaan	Pajak Rokok
2019	1.560.964.729.126	1.143.576.816.200	389.200.457.073	3.375.680.274	259.637.335.605
2020	1.406.305.266.650	1.256.433.265.300	398.841.411.716	3.669.053.842	244.087.933.600
2021	1.415.682.687.835	455.470.487.500	297.064.139.570	2.960.221.364	287.353.322.431
2022	1.691.067.147.050	790.440.045.700	411.061.253.416	3.384.913.300	334.886.047.725
2023	1.740.695.696.000	1.413.575.676.600	564.730.129.155	4.094.857.640	325.474.672.374

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2024)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa PKB mengacu pada jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kendaraan bermotor telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan tingkat mobilitas yang tinggi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut akhirnya mendorong peningkatan daya beli masyarakat terhadap sarana transportasi, sehingga terjadi pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang meningkat pula (Maharani & Adiputra, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa per tahun 2023, total kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Provinsi Bali berjumlah 5.016.351 unit, di mana hal ini mencerminkan adanya lonjakan sebesar 11,21% dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 4.510.791 unit. Fenomena peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Buleleng. Pernyataan tersebut didukung dengan data yang telah disajikan pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi PKB Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

Tahun	Unit yang Terdaftar	Unit yang Terealisasi	Realisasi Pendapatan	Unit yang Menunggak	Persentase Unit yang Menunggak
2019	452.681	247.246	117.143.271.700	205.435	45.38%
2020	465.076	225.325	109.837.215.325	239.751	51.55%
2021	474.431	213.642	109.319.869.400	260.789	54.97%
2022	496.621	222.461	125.710.882.350	274.160	55.21%
2023	524.799	235.287	132.627.019.900	289.512	55.17%

Sumber: UPTD PDRD Kabupaten Buleleng (2024)

Tabel 1.3 mengungkapkan bahwasanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng cenderung melonjak dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Seharusnya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang demikian adanya berkolerasi positif dengan realisasi penerimaan PKB yang semakin meningkat (Yasa *et al.*, 2020). Namun, data yang ada justru menyajikan gambaran yang sangat ironis. Dari total kendaraan yang telah terdaftar pada Kantor SAMSAT Buleleng,

hanya sebagian kecil yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2019, dari 452.681 unit kendaraan yang terdaftar, hanya 247.246 unit (54,62%) yang membayar pajak. Artinya, sebanyak 205.435 unit (45,38%) lainnya menunggak untuk membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotornya. Selanjutnya, pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang membayar pajak menurun menjadi 225.325 unit (48,45%) saja.

Tren ini berlanjut pada tahun 2021, dengan hanya 213.642 unit (45,03%) yang membayar dan 260.789 unit (54,97%) lainnya menunggak. Kemudian, di tahun 2022, hanya terdapat 222.461 unit (44,79%) yang membayar PKB dari total 496.621 unit kendaraan yang terdaftar. Keadaan ini terlihat semakin miris pada tahun 2023, di mana walaupun jumlah kendaraan yang terdaftar mengalami peningkatan menjadi 524.799 unit, justru jumlah kendaraan yang menunggak juga naik secara signifikan. Pada tahun tersebut, kendaraan yang menunggak menjadi 289.512 unit (55,17%), angka yang cenderung tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, data dari hasil studi pendahuluan pada Kantor SAMSAT Buleleng menggambarkan bahwa meskipun jumlah kendaraan terus bertambah, tingkat kepatuhan pembayaran pajak justru semakin menurun, yang mana hal ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor PKB.

Timbulnya tunggakan PKB yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Buleleng mengindikasikan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajak. Perilaku patuh disini merujuk pada wajib pajak yang telah menunaikan beban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, termasuk tidak memiliki tunggakan untuk seluruh jenis pajak,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Bentuk ketidakpatuhan wajib pajak sesungguhnya dapat disebabkan oleh keengganan melunasi utang pajak serta secara sengaja melakukan pengabaian bahkan penghindaran terhadap kewajiban perpajakan (Laksmi *et al.*, 2022). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersebut, berpotensi mengurangi penerimaan daerah yang cukup besar, di mana seharusnya dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kemakmuran rakyat. Apabila ketidakpatuhan ini terus berlanjut, maka akan muncul dampak negatif yang semakin luas, khususnya pada stabilitas ekonomi daerah hingga penurunan kepercayaan publik terkait kinerja pemerintah daerah (Sayuti, 2020). Oleh karena itu, masalah ini harus segera ditangani melalui kajian terkait beberapa faktor yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor guna memastikan stabilitas pendapatan daerah dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.

Alasan seseorang dalam berperilaku tertentu memiliki kaitan erat dengan konsep teori atribusi yang pertama kali dikaji oleh Heider pada tahun 1958 (Hasanah *et al.*, 2024). Dalam ruang lingkup kepatuhan pajak kendaraan bermotor, teori atribusi memberikan penjelasan mengenai perilaku patuh atau tidak patuhnya sejumlah wajib pajak yang dibagi atas atribusi disposisional dan situasional (Wardani *et al.*, 2024). Atribusi disposisional atau faktor internal diartikan sebagai faktor kausalitas yang bersumber dari dalam diri individu, seperti halnya kepribadian, persepsi, dan sebagainya. Sebaliknya, atribusi situasional atau faktor eksternal diartikan sebagai faktor kausalitas yang bersumber dari luar diri individu,

misalnya kondisi sosial, tekanan situasi tertentu, dan yang lainnya. Pada konteks ini, faktor internal yang mampu menyebabkan perilaku patuh dari seorang wajib pajak untuk melakukan pembayaran utang pajak kendaraan bermotornya ialah pemahaman pajak (Hartanti *et al.*, 2022). Sementara itu, faktor eksternal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini meliputi penerapan insentif pajak dan sosialisasi pajak. Dengan demikian, kajian mengenai faktor-faktor internal dan eksternal tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara optimal.

Pemahaman yang baik mengenai aspek perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, nyatanya masih banyak terdapat wajib pajak yang belum memahami dengan baik terkait regulasi dan prosedur perpajakan, khususnya terkait pembayaran PKB. Hal ini kerap menimbulkan keterlambatan pembayaran yang berimplikasi pada realisasi penerimaan PKB yang belum optimal di berbagai wilayah, termasuk pada kantor SAMSAT Buleleng. Pemahaman pajak ini mengacu pada cara pandang wajib pajak dalam memahami aturan dan prosedur perpajakan melalui serangkaian proses edukasi serta informasi yang diberikan (Hazmi *et al.*, 2020). Hal ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk bertindak dan menentukan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Dengan demikian, peningkatan pemahaman perpajakan diharapkan mampu memberi dorongan bagi wajib pajak yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar dapat meminimalisir keterlambatan pembayaran PKB yang terjadi pada Kantor SAMSAT Buleleng. Efriyenty (2019) dan Ramadhanty (2020)

mendukung pernyataan tersebut dengan temuan yang mendapatkan hasil bahwasanya pemahaman pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara, hasil observasi oleh Safina (2022) dan Nursanah (2024) menemukan bahwa pemahaman pajak tidak memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Di sisi lain, insentif pajak yang diterapkan oleh pemerintah juga menjadi satu dari banyak aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada awalnya, kebijakan insentif pajak dalam hal PKB hanya diberlakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di tengah penurunan ekonomi negara saat terkena dampak pandemi COVID-19 (Dani *et al.*, 2024). Namun kini, kebijakan insentif pajak tetap diberlakukan secara berkelanjutan berdasarkan putusan PMK-20/PMK.010/2021. Adapun alasan utama ditetapkannya keputusan tersebut ialah karena kendala seperti keterlambatan pembayaran atas PKB dari pihak wajib pajak yang masih terjadi setiap tahun, sehingga menimbulkan utang pajak. Oleh karena itu, penerapan insentif pajak ditujukan untuk memacu minat wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dengan menawarkan pengurangan atau bahkan pembebasan atas denda keterlambatan pembayaran pajak (Syarif *et al.*, 2023). Penelitian oleh Latief & Zakaria (2020) dan Sartika *et al.* (2023) menyatakan hasil bahwasanya penerapan insentif pajak memberikan dampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda halnya dengan temuan Aprilianti (2021) dan Wulandari & Budiwitjaksono (2022) yang tidak memperoleh pengaruh signifikan dari penerapan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Walaupun pemerintah telah berupaya menyusun suatu kebijakan yang bertujuan untuk menekan beban dan menggerakkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melalui penerapan insentif, tetapi fenomena tunggakan PKB pada Kantor SAMSAT Buleleng menunjukkan bahwa masyarakat cenderung belum memahami sistem serta prosedur perpajakan yang tersedia saat ini. Rositayani & Purnamawati (2022) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak bisa ditanggulangi melalui upaya penyelenggaraan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara interaktif di berbagai media, baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terdapat ruang untuk memperoleh informasi, maka hal ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mereka dapat lebih memahami manfaat membayar pajak dan mengetahui kebijakan yang ditawarkan untuk mempermudah mereka dalam membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotornya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, Kantor SAMSAT Buleleng telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, seperti membentuk tim *door-to-door* yang bertugas mengidentifikasi tunggakan pajak sembari menyelenggarakan sosialisasi terkait kebijakan pemutihan pajak. Selain itu, tim dari induk SAMSAT juga aktif melaksanakan sosialisasi di beberapa titik strategis seperti *traffic light* dan pasar, serta memanfaatkan media sosial yang mencakup *instagram*, *facebook*, dan sebagainya. Valentina *et al.* (2022) menekankan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan dengan metode yang efektif serta intens mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Milleani & Maryono (2022) dan Stevlyian & Agustiniingsih (2024) menemukan bukti empiris bahwasanya sosialisasi pajak berimplikasi positif sekaligus bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ammy

(2023) bahkan menyimpulkan bahwasanya sosialisasi pajak yang diangkat sebagai variabel pemoderasi dapat memberikan kekuatan efek signifikan pada pengaruh antara penerapan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, temuan tersebut berlawanan dengan hasil kajian yang diperoleh oleh Lianty *et al.* (2019) dan Amri & Syahfitri (2020) yang mengungkapkan justru sosialisasi perpajakan tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, *Jurnal Akuntansi & Ekonomika* karya Ardila *et al.* (2023) juga menyatakan jika variabel moderasi berupa sosialisasi pajak tidak mampu memperkuat atau menyebabkan hubungan antara penerapan insentif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi melemah.

Untuk menjembatani kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu yang beragam, maka sosialisasi pajak yang awalnya merupakan variabel independen diintegrasikan menjadi variabel moderasi pada kajian ini, sehingga sosialisasi pajak dapat berkedudukan sebagai aspek yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pemahaman pajak dan penerapan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng. Variabel moderasi sosialisasi pajak diperlukan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi serta memahami korelasi antara pemahaman pajak dan penerapan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara lebih mendalam. Dengan memasukkan variabel moderasi, peneliti dapat mengungkap bagaimana penyampaian informasi dan edukasi dapat mengubah dampak pemahaman dalam diri wajib pajak serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dengan judul penelitian **“Sosialisasi Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Pajak dan Penerapan**

Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng”

1.2 Identifikasi Masalah

Berfokus pada uraian fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, di antaranya:

1. Terdapat sejumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang masih belum membayar PKB dengan tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali pada Kantor SAMSAT Buleleng, sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan PAD dan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.
2. Realisasi penerimaan PAD sangat bergantung pada sektor pajak daerah khususnya PKB. Akan tetapi, rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berimplikasi negatif terhadap optimalisasi penerimaan PKB pada Kantor SAMSAT Buleleng.
3. Pemahaman pajak, penerapan insentif pajak, serta sosialisasi pajak yang belum optimal menjadi beberapa faktor yang mendorong ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan pada Kantor SAMSAT Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga tidak menyimpang dari fenomena yang akan diteliti. Dengan dasar identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada batasan masalah yang meliputi dua variabel

independen yakni Pemahaman Pajak dan Penerapan Insentif Pajak, serta variabel dependen terkait Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi. Objek penelitian pada Kantor SAMSAT Buleleng disebabkan oleh isu tunggakan atas pembayaran PKB setiap tahunnya. Di sisi lain, pemahaman pajak, penerapan insentif pajak, serta sosialisasi pajak termasuk sebagai faktor penting bagi kepatuhan wajib pajak karena berdampak terhadap penerimaan pajak daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian fenomena dan permasalahan sebelumnya, maka berikut ialah rumusan masalah penelitian yang ditetapkan.

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng?
2. Apakah penerapan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng?
3. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng dimoderasi sosialisasi pajak?
4. Apakah penerapan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng dimoderasi sosialisasi pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan di antaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng dimoderasi sosialisasi pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh penerapan insentif pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng dimoderasi sosialisasi pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Studi ini dimaksudkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman mengenai ilmu di bidang perpajakan khususnya determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang meliputi pemahaman pajak dan penerapan insentif pajak pada Kantor SAMSAT Buleleng yang dimoderasi dengan faktor sosialisasi pajak. Selain itu, diharapkan penelitian ini menjadi referensi ilmu untuk pengembangan teori relevansi terkait dengan variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menggali dan memperdalam ilmu di bidang perpajakan. Selama proses penyelesaian penelitian, peneliti akan terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data relevan, mempraktikkan keterampilan penelitian, serta memahami kompleksitas aspek perpajakan yang lebih dalam.

2) Bagi Wajib Pajak

Bagi pihak wajib pajak, diharapkan studi ini bisa memberikan pemahaman terkait peran pajak dalam mencapai kemakmuran rakyat melalui optimalisasi kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan khususnya pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, diharapkan penelitian ini menambah daftar kepustakaan Universitas Pendidikan Ganesha serta menjadi referensi dalam ruang lingkup perpajakan khususnya konteks PKB.

4) Bagi Kantor SAMSAT Buleleng

Bagi Kantor SAMSAT Buleleng, diharapkan kajian ini memberikan informasi relevan kepada para otoritas pajak sebagai dasar dalam melakukan revitalisasi dan melahirkan inovasi kebijakan, sehingga bisa mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.